



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA SAUDARA
H. TUKIRANTA, MA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU SAUDARA DRS. SUGIYANTA SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PONCOSARI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Surat Panewu Srandakan Nomor 144/001, tertanggal 4 Januari 2021, perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota Bamuskal dan Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Bamuskal Poncosari;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Usulan Pemberhentian Saudara H. Tukiranta, MA dari Anggota Bamuskal Poncosari karena Meninggal Dunia dan Usulan Pengganti Antar Waktu Saudara Drs. Sugiyanta Sebagai Anggota Bamuskal Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul;
- Menimbang :
- a. bahwa peresmian pemberhentian Saudara H. Tukiranta, MA dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Saudara Drs. Sugiyanta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan

Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian karena Meninggal Dunia Saudara H. Tukiranta, Ma dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Drs. Sugiyanta Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA SAUDARA H. TUKIRANTA, MA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA DRS. SUGIYANTA SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara H. Tukiranta, MA dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul karena meninggal dunia dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Drs. Sugiyanta sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
5. Panewu Srandakan;
6. Lurah Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum

